

## Kejagung Lantik 27 Anggota Satgassus Penanganan Korupsi

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 orang anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Tahun 2023.

Acara pelantikan tersebut digelar secara internal pada Selasa (10/1), di Aula Lantai 6 Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.

“Para anggota Satgassus P3TPK tersebut akan ditempatkan di Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi, dan bergabung dengan para seniorinya dalam beberapa tim,” kata Febrie dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (11/1).

Sebanyak 27 anggota Satgassus itu merupakan peserta yang lulus dan memenuhi kriteria dari total 63 jaksa yang mendaftar. Penilaian dilakukan dengan komponen yang meliputi *hard* (kasar) kompetensi maupun *soft* (lunak) kompetensi.

Kemudian, Febrie mengatakan, bakal ada peni-

liran berkala terhadap 27 anggota Satgassus P3TPK.

“Secara periodik, akan dilakukan penilaian dan evaluasi kepada seluruh anggota Satgassus P3TPK sebagai bentuk pengawasan melekat dan implementasi terhadap janji serta pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing anggota,” ujar Febrie.

Febrie berharap seluruh anggota Satgassus P3TPK yang baru dilantik bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Hasil kinerja Satgassus P3TPK menjadi pertimbangan bagi Gedung Bundar karena kinerja baiknya terus ditunggu oleh masyarakat.

Ia juga mengimbau seluruh anggota Satgassus P3TPK terus menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diberikan.

“Semoga dengan keberadaan para anggota Satgassus P3TPK yang baru ini, dapat menjadi pemicu semangat dan memberi warna baru dalam optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Febrie. ● **mei**

## Jaksa Belum Siap, Pembacaan Tuntutan terhadap Bharada E Ditunda Pekan Depan

JAKARTA (IM) - Sidang pembacaan tuntutan terhadap Bharada E atau Richard Eliezer ditunda hingga pekan depan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyelesaikan berkas tuntutan.

“Izin majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan, keterangan terdakwa Putri Cabdrawathi yang sedianya hari ini (Rabu, 11/1) akan diperiksa. Kami minta waktu pembacaan tuntutan tunda satu minggu,” ujar Jaksa di persidangan, Rabu (11/1).

Jaksa menyebut bahwa berkas tuntutan dugaan kasus pembunuhan Brigadir J merupakan satu kesatuan. Namun, masih ada satu terdakwa, yakni Putri yang belum diperiksa keterangannya sebagai terdakwa sehingga berkas tuntutan belum bisa

dirampungkan saat ini.

“Baik. Oleh karena alasan penuntut umum tadi, saudara terdakwa keterangan Putri belum masuk dalam surat tuntutan saudara. Maka Jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis berikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan penuntut umum bacakan tuntutan bersama terdakwa lain,” kata Ketua majelis hakim, Wahyu Iman Santoso.

Tim pengacara Bharada E mengaku mereka mengikuti penetapan hakim tersebut. Alhasil, sidang dengan terdakwa Bharada E yang digelar sekitar pukul 09.45 WIB itu pun ditutup pada sekira pukul 10.00 WIB.

Sidang beragendakan tuntutan oleh Jaksa dengan terdakwa Bharada E bakal digelar pada Rabu, 18 Januari 2023 mendatang. ● **han**

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## Kini Terjadi Kekosongan Kekuasaan di Papua Setelah Lukas Enembe Ditangkap

Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah alternatif agar pemerintahan di Papua tetap berjalan pasca penangkapan Lukas Enembe.

JAKARTA (IM) - Saat ini terjadi kekosongan kekuasaan di Papua pasca penangkapan gubernurnya, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab Wakil Gubernur Papua sudah meninggal dunia.

Lukas Enembe merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah alternatif agar pemerintahan di Papua tetap berjalan.

“Ya. Sudah ada langkah-langkah alternatif pokoknya pemerintah tidak boleh

macet, pemerintahan harus tetap jalan,” kata Mahfud MD di Kantor Kemkeno Polhukam, Rabu (11/1).

Mahfud menegaskan, pihaknya telah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif tersebut, dengan berbicara bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya. “Kan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis, kita sudah bicara dengan Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, Menkes, dan sebagainya, kita sudah rapat,” ucapnya.

Namun, Mahfud belum dapat meminci apa langkah alternatif tersebut, dan belum menjelaskan siapa yang akan

mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan Papua.

“Nanti ditunggu aja langkah berikutnya,” katanya.

Sebagai informasi, hingga Rabu (11/1) pagi, Lukas Enembe masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Lukas masih butuh dirawat di RSPAD untuk beberapa waktu ke depan atas rekomendasi dari dokter.

Lukas Enembe setelah tiba di Jakarta langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk memeriksa kesehatannya. Ia ditangkap oleh petugas gabungan dari KPK serta Kepolisian di Jayapura, Papua, pada Selasa (10/1) siang.

Lukas Enembe ditangkap saat sedang makan siang di sebuah restoran daerah Abepura, Jayapura.

KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka ber-

sama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka

## RAKER KEMENAKER DENGAN KOMISI IX DPR RI

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). Raker tersebut membahas tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan.

## Yusril Nilai MK Tidak Berwenang Menguji Perppu Cipta Kerja

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara, Yusril Iha Mahendra menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

MK disebut bertindak prematur jika menguji perppu sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi sikap atas perppu tersebut.

“Apakah MK berwenang menguji Perppu? Saya berpendapat, MK sebenarnya tidak berwenang menguji Perppu sebelum Perppu itu disahkan menjadi UU,” kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (11/1).

Konstitusi telah memberi kewenangan ke DPR untuk lebih dulu membahas perppu sebelum memutuskan apakah menerima atau menolak perppu tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sikap MK yang lebih dulu menyatakan Perppu bertentangan dengan konstitusi saat DPR sedang membahas perppu tersebut dapat menimbulkan sengketa kewenangan.

“Hal semacam itu harus dijauhi MK. Karena jika terjadi sengketa kewenangan antara DPR dengan MK, maka MK adalah satu-satunya yang berwenang mengadili sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD,” kata Yusril.

Yusril mengingatkan, salah satu syarat menjadi hakim MK adalah negarawan yang memahami konstitusi. Oleh karena itu, Yusril berpesan agar para hakim MK menahan diri untuk menguji

perppu sebagaimana yang dilakukan MK selama ini.

Adapun Perppu Cipta Kerja digugat ke MK pada Kamis (5/1) pekan lalu setelah diterbitkan oleh Jokowi pada 30 Desember 2022. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang dosen dan konsultan hukum kesehatan bernama Hasrul Buamona dan Koordinator Advokasi Migrant Care, Siti Badriyah.

Kemudian, konsultan hukum para anak buah kapal (ABK) bernama Harseto Setyadi Rajah serta seorang mantan ABK migran, Jati Puji Santoso. Tak hanya itu, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid (Usahid) bernama Syaloom Mega G Matitaputty dan Ananda Luthfia Ramadhani juga turut menjadi penggugat. Mereka memberi kuasa kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Viktor Santoso Tandiasta dan Zico Leonard Djarardo Simanjuntak.

“Pesannya itu adalah jangan Lecehkan Mahkamah Konstitusi,” ujar Viktor kepada wartawan, Jumat (6/1) lalu.

Viktor menilai, tindakan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk pelecehan terhadap MK. Apabila Perppu ini tidak dibatalkan, maka semua lembaga negara berpotensi akan mengikhti pembangkangan yang sama untuk tidak mematuhi putusan MK apabila tidak sejalan dengan keinginannya.

“Maka untuk apa lagi ada Mahkamah Konstitusi? Jangan membangkang UUD 1945, tindakan menerbitkan Perppu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi,” kata Viktor. ● **han**

## PSI Minta Maaf Usai Disindir Megawati soal Mencalonkan Ganjar di Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta maaf usai disindir Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, soal pencalonan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang.

Megawati memang tidak menyebut nama partai politik yang mengusung kader PDIP itu untuk maju pada Pilpres 2024.

“Lah kok kayak gitu, gimana sih maunya. Emangnya enggak punya kader sendiri,” kata Megawati dalam pidatonya saat HUT ke-50 PDIP, di JIIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (10/1).

Namun Putri Bung Karno itu tidak menyebut secara gamblang partai apa yang dimaksudnya dan siapa kader yang akan diusung oleh partai tersebut.

Menanggapi pernyataan Megawati, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan, PSI meminta

maaf kepada Megawati. Dia beralasan, bahwa pencalonan Ganjar Pranowo untuk capres di 2024, bukan bermaksud untuk mengambil kader Partai Banteng tersebut.

“Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. PSI partai muda, kami masih awam dan naif. Kami kurang memahami mekanisme rekutmen di PDIP,” kata Grace dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/1).

Sebagai partai baru, kata Grace, PSI belum bisa melancarkan maupun mengusung calon presiden sendiri. Dia menyebut, partainya hanya menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan para pendukung PSI yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden selanjutnya berdasarkan hasil Rembuk Rakyat PSI.

“Dukungan terhadap Ganjar bukan berarti kami mengambil kader PDIP. Just

tu ini merupakan pengakuan dari kami bahwa senior kami telah menghasilkan para pemimpin hebat,” tuturnya.

“Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dalam pidato di acara HUT ke-50 PDIP ditujukan ke PSI,” katanya menambahkan.

Oleh karena itu, siapapun nantinya yang akan diusung PDIP, merupakan pilihan yang terbaik untuk Indonesia.

“Sebagai sesama partai nasionalis, dan boleh disebut sebagai adik PDIP, kami akan selalu berjuang untuk kemajuan dan ketuhanan NKRI,” ujar Grace.

Menurutnya, PDIP telah banyak melahirkan pemimpin dan negarawan yang hebat. Salah satunya, Presiden Jokowi.

“Kami yakin bahwa PDIP akan mendukung kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu di antaranya Pak Ganjar,” jelasnya. ● **mei**

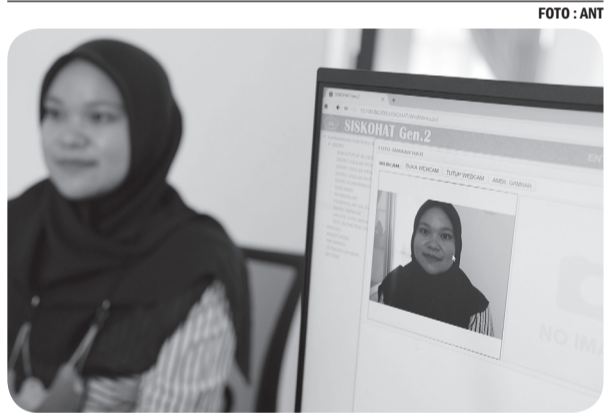


FOTO: ANT

## KUOTA HAJI 2023

Warga melakukan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (11/1). Pemerintah Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menuaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada tahun 2023 dengan rincian kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus.

## Update: 73 Rumah Rusak di Maluku Barat Akibat Gempa

JAKARTA (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, lebih dari 70 rumah warga di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, mengalami kerusakan.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten MBD, total rumah rusak di wilayahnya mencapai 73 unit. Dari jumlah tersebut, rumah rusak berat sebanyak 29 unit, sedangkan rusak ringan 44. Selain itu, dua Gedung sekolah dan satu gereja mengalami rusak ringan.

“Data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada Selasa (10/1), pukul 19.34 WIB, 73 rumah warga di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, rusak,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran pers, Rabu (11/1).

Dilaporkan, 5 warga Ma-

luku Barat Daya mengalami luka-luka. Namun sejauh ini belum ada laporan berapa banyak pengungsi. Sementara itu, kerusakan rumah warga di Kabupaten Tanimbar masih tercatat sejumlah 92 unit. Delapan rumah di antaranya mengalami kerusakan berat. Sementara itu, rumah rusak ringan mencapai 80 unit, dan rumah rusak sedang sebanyak 4 unit. Memang, gempa di Maluku memiliki dampak bagi beberapa kabupaten.

“Wilayah terdampak di Kabupaten Maluku Barat Daya, antara lain tersebar di Kecamatan Dawelor Dawa, Leti, dan Damer,” ucap Abdul.

Lebih lanjut pria yang karib disapa Aam ini menyebut, BPBD Provinsi Maluku telah mengerahkan personel dan bantuan logistik pasca-gempa, antara lain petugas pusdalops, tenaga medis serta bantuan obat-obatan. Dukungan ini untuk penanganan darurat di Kabupaten Tanimbar dan MBD. ● **han**



FOTO: ANT

## PEMERIKSAAN SAHAT TUA SIMANJUNTAK

Tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Sahat Tua Simanjuntak (kanan) berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/1). Sahat Tua Simanjuntak diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jawa Timur (Jatim).

ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS INVITATION PT SMART BELI COMMERCIANDO	PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SMART BELI COMMERCIANDO
In compliance with the provisions of Article 82 paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (the “Company Law”), the Board of Director of PT Smart Beli Commercindo (the “Company”), domiciled at Liberty Tower Unit Code OTB 25W/F, Pantai Indah Kapuk, North Jakarta, Indonesia, hereby invite all of the shareholders, the board of directors, and the board of commissioners of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be held on:	Guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), Direksi PT Smart Beli Commercindo (“Perseroan”), berkedudukan di Liberty Tower Unit Code OTB 25W/F, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia, dengan ini mengundang para pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS/SLB”) yang akan diselenggarakan pada:
Day : Monday Date : 23 January 2023 Time : 10.00 WIB until finish Place : The Company's Office, Liberty Tower Unit Code OTB 25W/F, Pantai Indah Kapuk, North Jakarta, Indonesia	Hari : Senin Tanggal : 23 Januari 2023 Waktu : 10.00 WIB sampai selesai Tempat : Kantor Perseroan, Liberty Tower Unit Code OTB 25W/F, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia
With the following agendas: 1. Approving the report of the distribution of total remaining assets resulting from the liquidation of the Company; 2. Approving the release and discharge (acquittal) of the liquidator and the liquidation team of the Company; and 3. Other matters related to the dissolution of the Company.	dengan agenda sebagai berikut: 1. Menyetujui laporan pembagian total sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan oleh likuidator; 2. Menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquittal) dari likuidator dan tim likuidasi Perseroan; dan 3. Hal-hal lain sehubungan dengan pembubaran Perseroan.
Note: 1. The shareholders, director, commissioner, or their proxies who will attend the EGMS must submit a copy of an identity card or other valid identification before entering the meeting room. 2. For the smooth of the arrangement and order of the EGMS, the shareholders, director, commissioner, or their proxies must arrive in the venue of the EGMS 30 (thirty) minutes before the EGMS begins.	Catatan: 1. Para pemegang saham, direktur, komisaris, atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS/SLB harus menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ke ruang rapat. 2. Untuk kelancaran pengaturan dan tata tertibnya RUPS/SLB, para pemegang saham, direktur, komisaris, atau kuasanya diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat RUPS/SLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS/SLB dimulai.
Jakarta January 2, 2023 Board of Directors PT Smart Beli Commercindo	Jakarta, 2 Januari 2023 Direksi PT Smart Beli Commercindo